

Judul : Akses Industri ke Gas Murah Terganjil Birokrasi
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Akses Industri ke Gas Murah Terganjil Birokrasi

Pelaku usaha mesti membayar lebih mahal harga gas karena terkendala rantai birokrasi

**Arfiana Citra Rahayu,
Filemon A. Hadiwardoyo**

JAKARTA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR sepakat mengkaji ulang aturan gas murah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15/2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Tutuka Ariadi menyampaikan evaluasi yang disepakati antara Komisi VII dan Kementerian ESDM mencakup beberapa hal salah satunya mengenai birokrasi.

"Terkait evaluasi (untuk dapatkan gas) melalui banyak (pihak), sehingga membuat badan usaha miaga harus ada tambahan birokrasi," kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/2).

Tutuka menegaskan sejauh ini tidak ada niatan untuk menaikkan harga gas murah. Masalahnya jika ingin mengubah harga, akan mengubah Perpres. Asal tahu saja, peraturan harga gas murah untuk sebagian industri ini diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 121/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Untuk melaksanakan Perpres tersebut, Menteri ESDM menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15/2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Tutuka juga menampik soal wacana yang menaut sebetulnya mengenai harga gas yang diminta untuk dilepas ke harga pasar. Menurutnya jika ingin menumbuhkan industri harus menggunakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) supaya industri bisa bertahan dan berekspansi. Jika menggunakan harga pasar, dia menyatakan, industri akan mati.

Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman mengatakan, sebagian pelaku industri menganggap rantai birokrasi perizinan terkait miang untuk mendapatkan harga gas murah menjadi panjang. "Kenapa jadi panjang? Karena di Permen harus melibatkan persetujuan SKK Migas, ESDM lagi dan lain sebagainya.

Artinya setiap institusi punya fokusnya masing-masing," ujar Maman.

Maman turut menyoroti banyaknya kata 'paling sedikit' di dalam Permen 15/2022 yang dimulainya multi tafsir. Dia khawatir jika mengabaikan permohonan harga gas men-

ingkatkan paling sedikit 5 syarat bisa jadi ketika syarat ter-

**Untuk mendapat
harga gas murah
harus dapat izin
SKK Migas,
ESDM, dan PGN**

sebut diberikan, dianggap oleh pihak lain tidak cukup.

Direktur Utama PGN M Haryo Yumanto bilang, pihaknya telah menyatukan alokasi mencapai 100%, sayangnya realisasi serapan oleh industri baru mencapai sekitar 75% pada tahun 2022 lalu. "Secara alokasi kami sudah siapkan semuanya walaupun serapannya baru kurang lebih rata-rata 70%," ungkap Haryo.

Menilik data PGN, serapan gas bumi oleh sektor industri

pada tahun 2020 mencapai 224 BBTU/D (*billion british thermal unit per day*) atau setara 60% dari alokasi sebesar 374 BBTU/D. Serapan ini naik menjadi 28% di tahun 2021 atau setara 200 BBTU/D dari alokasi 374 BBTU/D.

Jumlah ini mengalami penurunan secara persentase menjadi 75% pada 2022 meskipun secara volume sebetulnya meningkat menjadi 208 BBTU/D dari alokasi 308 BBTU/D.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLEP) Yustinus Gunawan menjelaskan, dengan panjangnya birokrasi, mendapatkan harga gas murah konsekuensinya adalah kekurangan serapan gas bumi yang mencapai 25% tersebut harus dibayar 5 sektor industri dengan harga yang lebih tinggi.

Selain itu, pasokan gas untuk wilayah Jawa Timur disebut hanya mencapai 60% pada Januari 2023 ini. Salah satu penyebabnya yakni kelambatan proses administrasi dan penyelesaian masalah teknis.

"Seharusnya PGN tidak mengrang pasokan HGBT dan konsisten mendukung program pemerintah untuk menaikkan kontribusi sektor ma-

nuufaktur," kata Yustinus.

Yustinus melanjutkan, kontribusi devisa hasil ekspor sektor manufaktur sepanjang tahun 2022 mencapai 70,67%. Pelaku usaha pun berharap pelaksanaan HGBT tetap dilakukan untuk tahun ini, terlebih dengan rampungnya proyek Jambaran Tinggi Baru (JTB). Kehadiran proyek ini diyakini bisa mendorong ketersediaan pasokan gas bumi wilayah Jawa Timur.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengungkapkan, realisasi serapan gas bumi US\$ 6 per MMBTU oleh industri keramik terus mengalami peningkatan. "Tahun 2022 serapan sekitar 63,3 BBTU/D dan ini meningkat menjadi 77,2 BBTU/D per Oktober 2022," ungkap Edy kepada KONTAN, Rabu (1/2).

Edy melanjutkan, peningkatan serapan gas bumi ini pun menunjukkan adanya peningkatan utilisasi oleh sektor industri. Tercatat, utilisasi produksi pada tahun 2020 baru mencapai 50%. Jumlah ini meningkat berharap menjadi 75% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 78% pada tahun lalu. ■